



The Institute of
Internal Auditors
Indonesia

PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DALAM MENDORONG PENGUATAN KOLABORASI PENANGANAN COVID-19 DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

IWAN TAUFIQ PURWANTO, S.E., MBA, QIA, CRMA., CGCAE.

DEPUTI KEPALA BPKP BIDANG PENGAWASAN INSTANSI PEMERINTAH BIDANG POLITIK, HUKUM,
KEAMANAN, PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN



“Internal Audit Back to The Future – Emerging From the Crisis”

Framework Akuntabilitas PC-PEN

Arahan Presiden

**Respon Pemerintah Indonesia
dan BPKP selaku Auditor Intern
Pemerintah**

Survei IIA

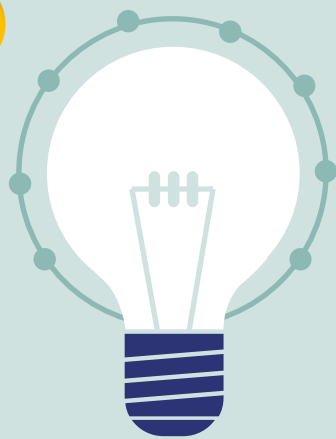
4

5

3

2

1



Kelemahan yang masih ada

6

Kolaborasi BPKP-APIP

7

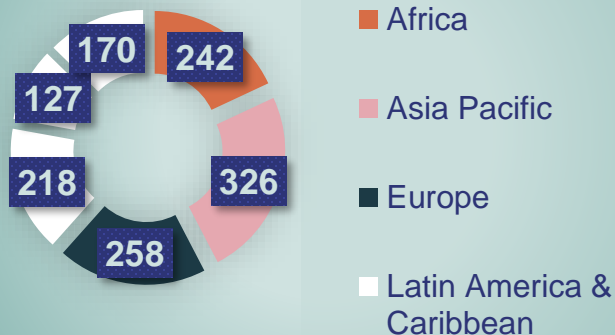
**New Three Line Model & case
studies : Penyerapan Anggaran,
PBJ, BTWPKL**

8

Simpulan

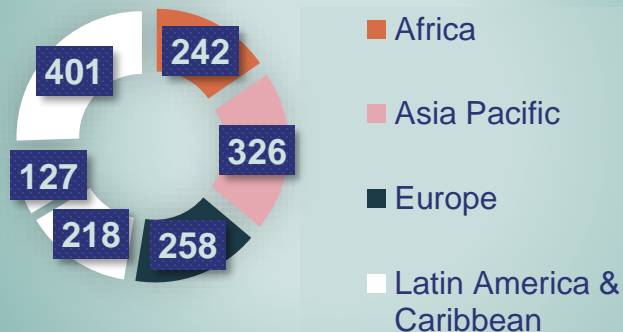


Responden Part 1



The Institute of Internal Auditor (IIA) telah melakukan survei untuk mengetahui lebih detail tentang dampak global COVID-19 pada berbagai organisasi pada 95 negara dengan 1.341 responden auditor internal dan untuk mengetahui dampak global COVID-19 pada fungsi auditor internal dilakukan survei pada negara yang sama dengan jumlah 1.572 responden.

Responden Part 2



Hasil survei tersebut telah dipublikasikan dalam dua bagian yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Part -1 : HOW ORGANIZATIONS GLOBALLY ARE RESPONDING TO COVID-19

Menguraikan bagaimana organisasi lintas benua merespon atas *Pandemic COVID-19*

Part-2 : COVID-19: THE INITIAL IMPACT ON INTERNAL AUDIT WORLDWIDE

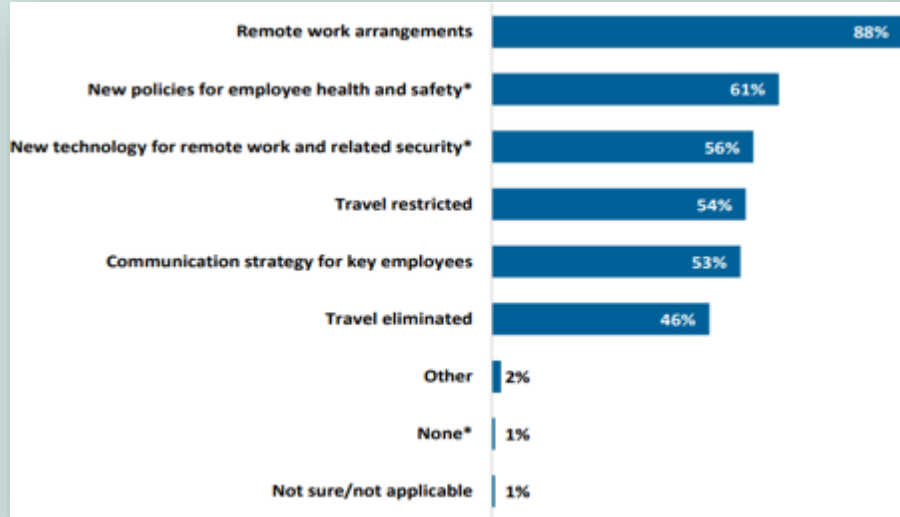
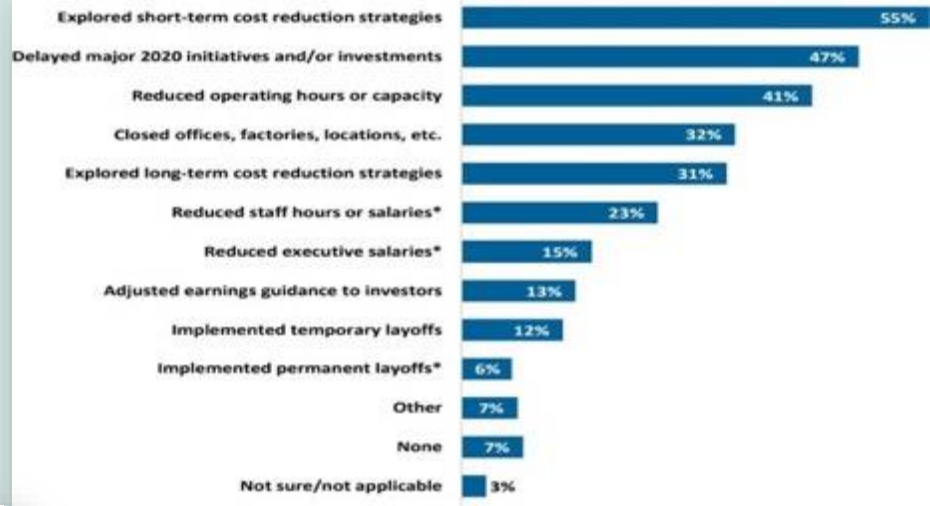
Menguraikan bagaimana dampak COVID-19 pada fungsi auditor internal.

Bagian Pertama hasil survei tersebut menguraikan bagaimana organisasi lintas benua merespon atas *Pandemic COVID-19*

- 1 Kemiripan aksi organisasi global dalam melakukan aksi finansial
- 2 *Strategic responses*: fokus pada dampak jangka pendek dan keberlangsungan operasi bisnis.
- 3 Adaptasi cara kerja pegawai, yaitu hampir 90% menerapkan bekerja jarak jauh (*remote work for employees*)
- 4 Melakukan strategi baru untuk berkomunikasi dengan para *stakeholders*, yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan dalam layanan yang diberikan.



Fokus pada pengurangan biaya (untuk direlaokasikan atau refocusing guna penanganan COVID- 19)



Adaptasi cara kerja pegawai, yaitu hampir 90% menerapkan bekerja jarak jauh (*remote work for employees*), menerapkan kebijakan kesehatan dan keselamatan bagi pegawai, termasuk pembatasan perjalanan dinas atau bahkan meniadakannya

Bagian Kedua dari survei IIA dengan jumlah responden yang sama (kecuali untuk wilayah Amerika Utara yang lebih banyak) menguraikan bagaimana dampak COVID-19 pada fungsi auditor internal

Pengurangan anggaran untuk Fungsi Internal Audit sebagai dampak pertama dan utama dengan adanya *Pandemic* COVID-19

Pengurangan anggaran ini secara umum terjadi pada fungsi Fungsi Internal Audit lintas benua, dibandingkan dengan pengurangan jumlah auditor

Organisasi lintas benua melibatkan Fungsi Internal Audit dalam diskusi dan pembahasan sejak awal tentang risiko-risiko lanjutan yang akan dihadapi dan bagaimana respon atau mitigasi atas risiko tersebut dalam masa *Pandemic* COVID-19

Intensitas pelibatan Fungsi Internal Audit berkorelasi positif dengan status zona COVID-19 di setiap negara atau *region*



Fungsi Internal Audit melakukan respon dengan prioritas pada revisi atau update rencana audit tahunan (PKPT), identifikasi risiko yang masih mungkin timbul, melakukan reviu atas penilaian risiko dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Lebih rinci:

- 59 % melakukan pembatalan rencana penugasan
- 53% tidak melanjutkan atau mengurangi lingkup penugasan yang sedang berjalan

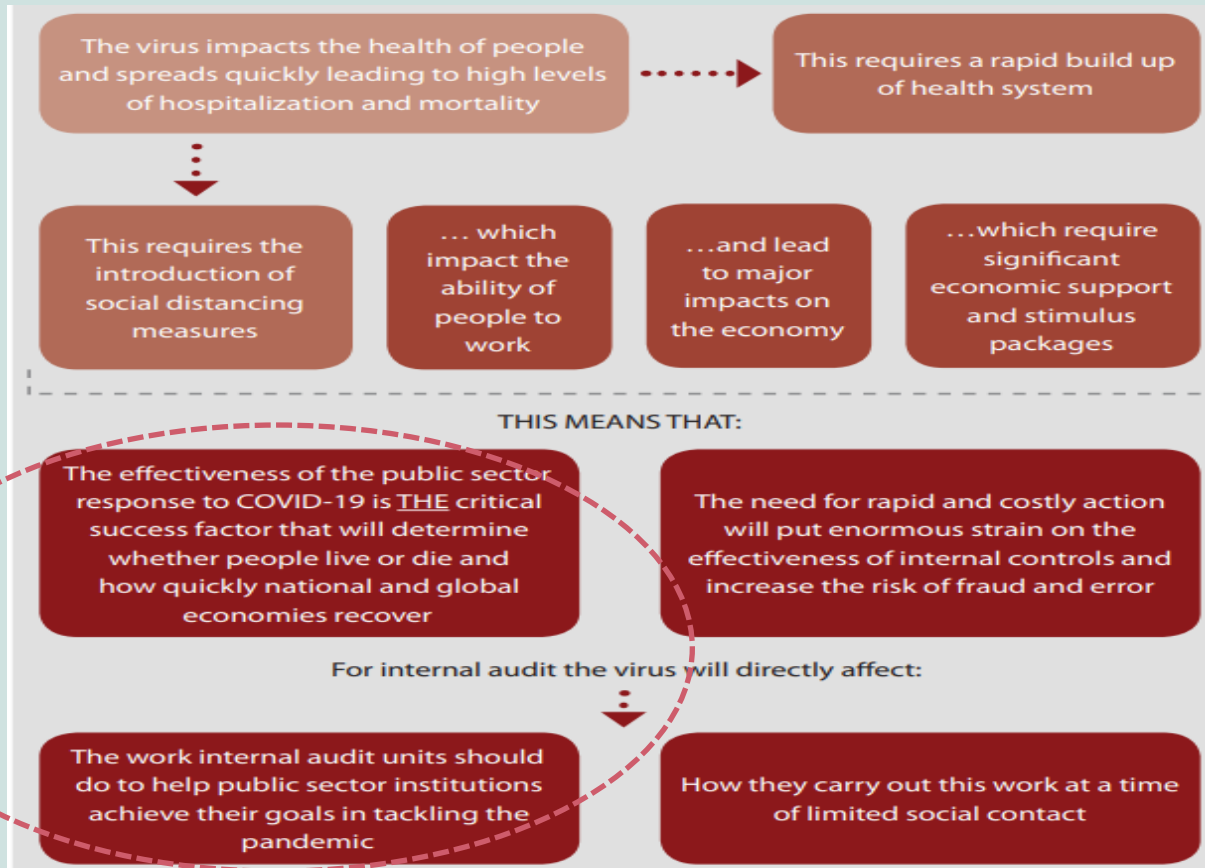
Hal yang menarik:

- 42% menambah jenis penugasan baru
- 20% meningkatkan lingkup beberapa penugasan yang telah atau akan dilakukan

Aktifitas Fungsi Internal Audit meningkat pada penugasan terkait *health & safety, cybersecurity, Enterprise Risk Management, business continuity planning, IT, dan cost control/reduction.*



The COVID-19 pandemic - impact on the public sector & internal audit



2020



2021



Semua K/L juga melakukan realokasi anggaran dan *refocusing* kegiatan, bahkan semua K/L (termasuk BPKP) mengalami pemotongan atau efisiensi anggaran. Meskipun kemudian beberapa K/L memperoleh tambahan anggaran untuk penanganan COVID-19 dan dampaknya, termasuk BPKP memperoleh tambahan anggaran untuk pengawasan COVID-19.

01 Refocussing Anggaran dan Pengusulan ABT

02 Berkolaborasi dan Bersinergi

03 Revisi PKPT

04 Pedoman Sistem Kerja Pegawai dalam Adaptasi Tatanan Normal Baru di Lingkungan BPKP



Hasil survei IIA Bagian Kedua yang telah dijelaskan pada Bab II Butir B tentang dampak COVID-19 pada fungsi auditor internal lintas benua, oleh penulis dijadikan rujukan *international best practices* untuk menganalisis dan mengulas peran BPKP selaku Auditor Internal Pemerintah dalam melakukan pengawasan intern atas berbagai program dan kegiatan pemerintah untuk penanganan COVID-19 dan dampaknya.



Presiden Republik Indonesia (Presiden RI), Jokowi saat menyampaikan pidato kenegaraannya dalam sidang tahunan MPR RI (foto: Dokumen/Bisnis)

“Kerja sama antarlembaga, serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif, menjadi kunci dalam menangani pandemi. Saya yakin, kapasitas respons kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan bidang lain juga semakin kokoh,”

“Dengan kolaborasi penanganan secara nasional, maka mengendalikan sebaran pandemi bisa tercapai, karena melakukan pendekatan secara menyeluruh kepada masyarakat bisa terwujud”

“Kekompakan merupakan senjata utama meyakinkan masyarakat bahwa pandemi ini nyata. Jika semua elemen bangsa bersatu maka masalah akan selesai”

“Kerja sama antarlembaga, serta kepemimpinan yang responsif dan konsolidatif, menjadi kunci dalam menangani pandemi. Saya yakin, kapasitas respons kita dalam menghadapi ketidakpastian di bidang kesehatan dan bidang lain juga semakin kokoh”

Pencegahan Lebih Utama

“Pencegahan harus diutamakan. Tatakelola yang baik harus didahulukan. Kalau ada yang masih membandel, ada niat untuk korupsi, ada mens rea, maka silahkan digigit dengan keras... Uang Negara harus diselamatkan, kepercayaan rakyat harus dijaga..”

Kolaborasi Antar Lembaga

Sinergi APIP dengan Lembaga pemeriksa eksternal dan APH harus terus dilakukan. Dengan sinergi antar Lembaga yang baik, pemerintah akan bisa bekerja lebih baik menangani tantangan dan mengawal agenda besar bangsa menuju Indonesia maju

“Program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntabel, serta mampu mencegah terjadinya risiko moral hazard. Ini penting sekali, karena itu, saya minta pada Jaksa Agung, pada BPKP, pada LKPP dari awal sudah melakukan pendampingan dan jika diperlukan KPK juga bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan. Ini penting.”

- Presiden RI Joko Widodo





ARAHAN PRESIDEN PADA RAKORNAS PENGAWASAN INTERN

Istana Bogor, 27 Mei 2021

Di masa sulit seperti sekarang ini kita perlu bekerja cepat, perkuat **sinergi**, perkuat **kolaborasi**, perkuat **check and balance**

Saling bekerja sama, saling koreksi, saling memperbaiki agar program-program pemerintah berjalan efektif, masyarakat mendapat manfaat sebesar-besarnya, dan bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi





Urgensi Kolaborasi dalam Penanganan Covid-19 *(berbagai hasil penelitian akademis)*

COVID-19 has impacted almost all dimensions of society, including for example; health, the economy, and food security. We have learnt that this unprecedented pandemic cannot be handled by a government alone, rather it requires a range of stakeholders coming together with a common purpose; to fight against COVID-19 and its negative impacts. COVID-19 has highlighted that a multi-sectoral collaborative approach is essential in a time of crisis. However, **implementing and maintaining this multi-sectoral approach** during and post COVID-19 is a challenge.

(United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) and The United Nations Resident Coordinator Office (RCO), 2020)

In the field of **emergency management**, it is a consensus that emergency response is best understood as a **collaborative network** phenomenon.

(Waugh and Streib 2006)

In **disaster response**, the **collaborative network** is believed to be more effective than a market or hierarchy when requires an adaptive and flexible approach due to inconsistent information or uncertain conditions existing, or when the knowledge and resources are needed to address the issue spans boundaries.

(Provan and Lemaire 2012)

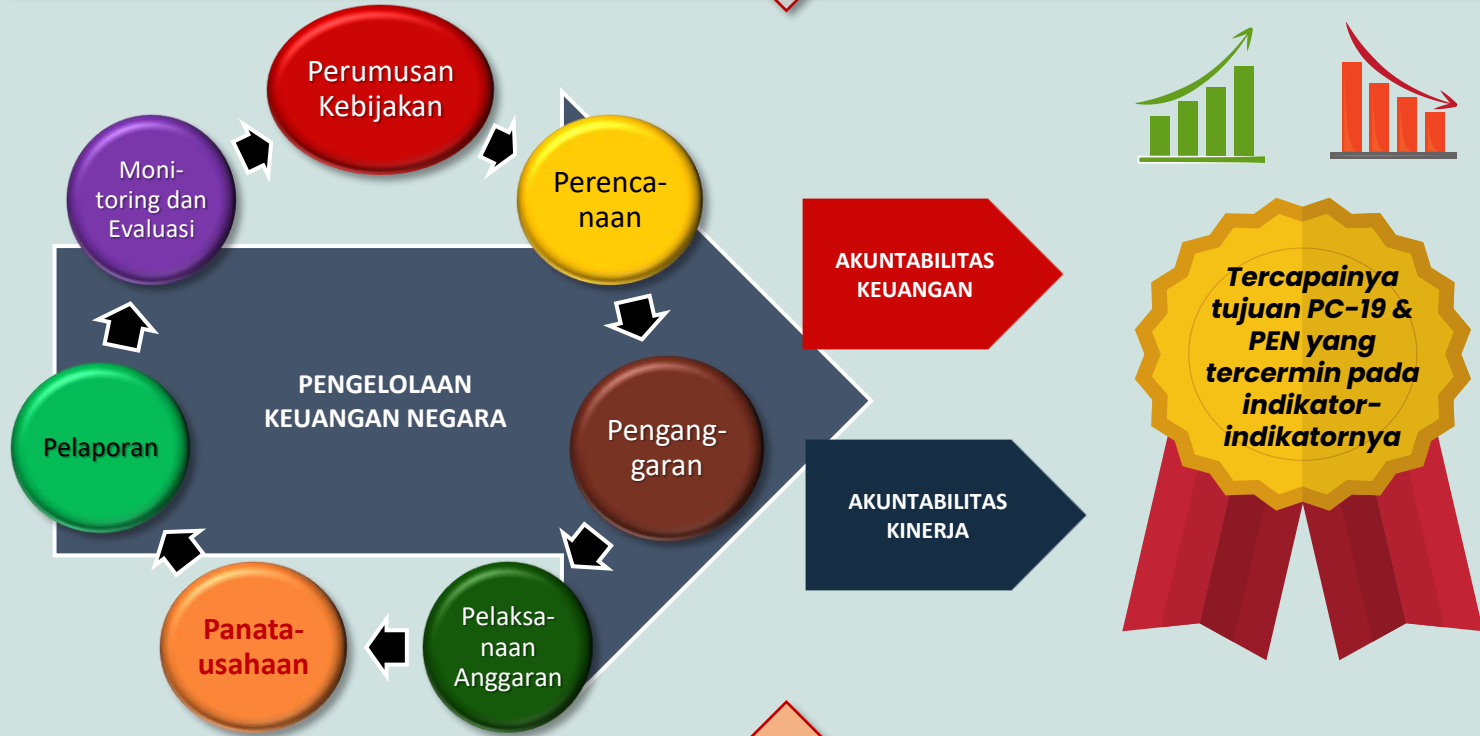
Emergency management organizations build and sustain the **collaborative network** to effectively mobilize efforts in response to the multiple events of disasters by sharing information, financial resources, human capital, and expertise.

(Kapucu and Garayev 2012)



FRAMEWORK AKUNTABILITAS PC-PEN oleh K/L/PEMDA, dan KORPORASI

SPIP dan Penerapan MR yang Efektif pada Seluruh Tahapan



Pengawasan dan Pengawasan BPKP dan APIP K/L/Pemda yang Optimal (Consulting & Assurance)

Kelemahan yang masih ada

01

Alokasi anggaran PC-PEN dalam APBN belum teridentifikasi dan terkodifikasi secara menyeluruh serta realisasi anggaran PC-PEN belum sepenuhnya disalurkan sesuai dengan yang direncanakan

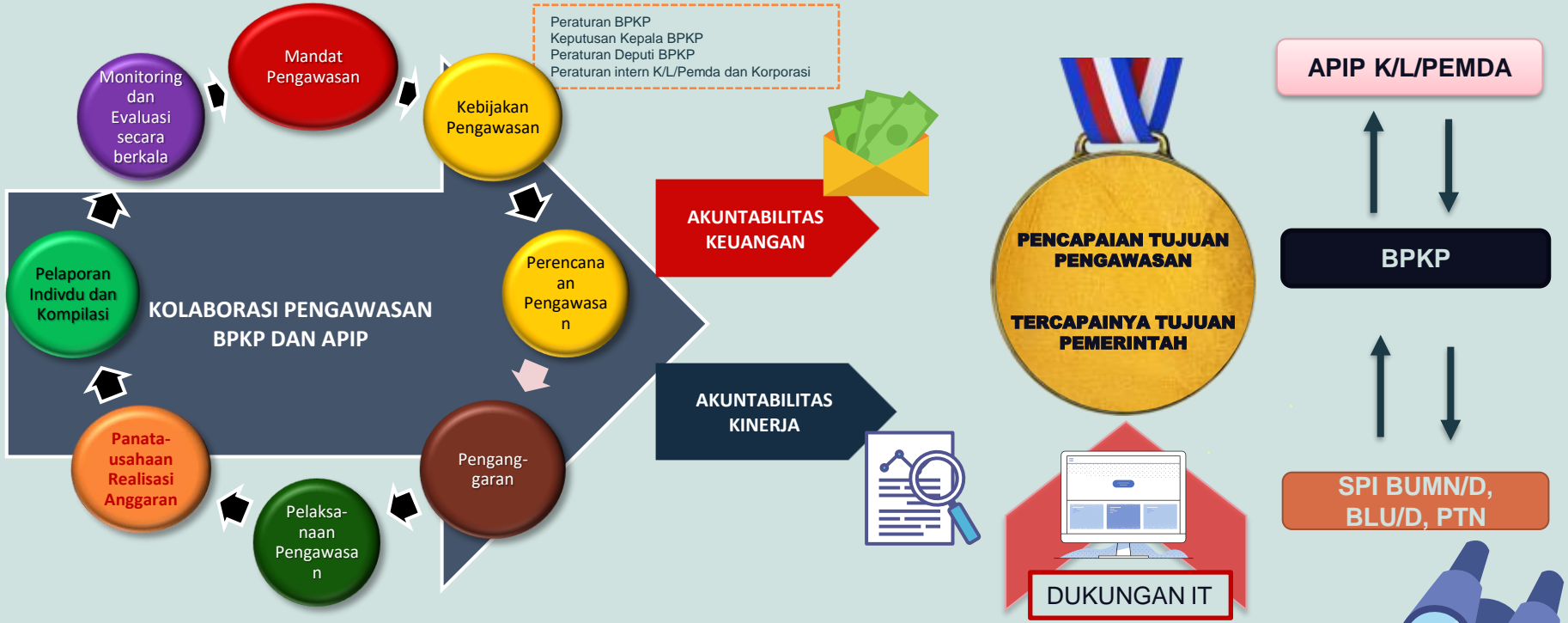
02

Pertanggungjawaban dan pelaporan PC-PEN, termasuk pengadaan barang dan jasa belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

03

Pelaksanaan program dan kegiatan manajemen bencana penanganan pandemi COVID-19 tidak sepenuhnya efektif

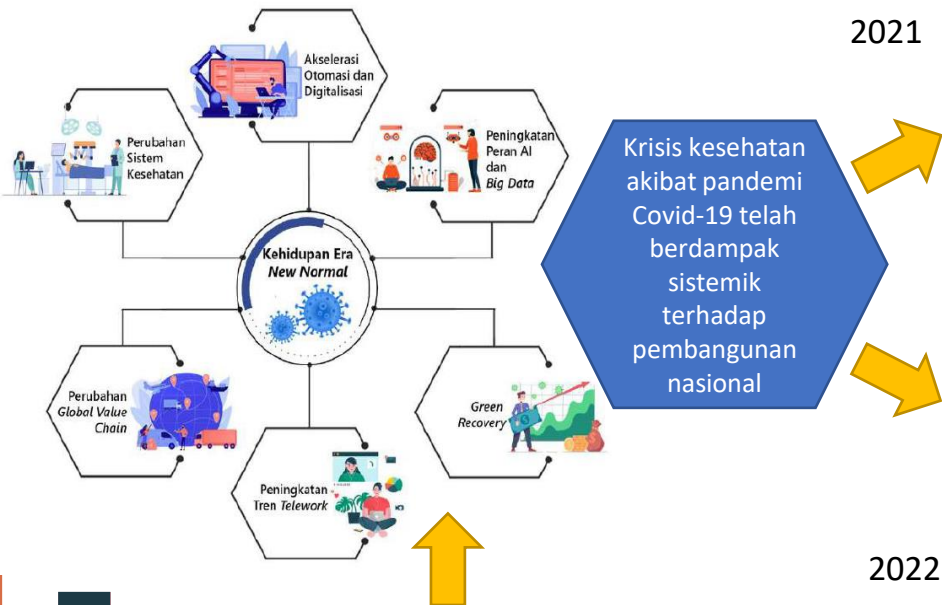
Framework Akuntabilitas Keuangan Kinerja FUNGSI PENGAWASAN INTERN



STANDAR AAPII, KODE ETIK, SKPI (BPKP)



Transformasi Digital Pengawasan



2020

- Pengawasan dilaksanakan menggunakan data hasil olah data untuk dianalisis (audit around the computer)

2021

- Dashboard Monitoring Was Vaksinasi COVID-19
- Sistem Informasi Pengawasan Pengadaan ASN (SIPP-ASN)
- Dashboard Monitoring Distribusi dan Stok Vaksin
- Aplikasi Monitoring Obat

Fokus pada **data pengawasan** yang cakupannya cukup luas, melibatkan **banyak auditor**, pelaksanaannya serentak, pengambilan uji petik lebih kearah **populasi**, hasilnya dapat digunakan **realtime**, keberadaan dashboard pengawasan tersebut sangat membantu dalam penyusunan **laporan progress pengawasan** harian, mingguan

2022

- Akses database dari aplikasi yang dibangun oleh kementerian / Lembaga
- Pengembangan aplikasi pengawasan utamanya terkait dengan **Data Analytics** untuk mendukung *continues audit*.

Pengembangan analisis dan pengujian substantif dengan menggunakan database, serta perluasan ruang lingkup pengawasan.

ATENSI KPK DALAM PEMBELANJAAN BARANG & JASA SERTA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

Itikad Baik + Sesuai Ketentuan Hukum



tidak melakukan
persekongkolan / kolusi
dengan penyedia barang /
jasa atau para pihak



tidak memperoleh
kickback



tidak
mengandung
unsur penyuapan



tidak
mengandung
unsur gratifikasi



tidak mengandung
unsur adanya
benturan kepentingan



tidak mengandung
unsur kecurangan
atau mal
administrasi



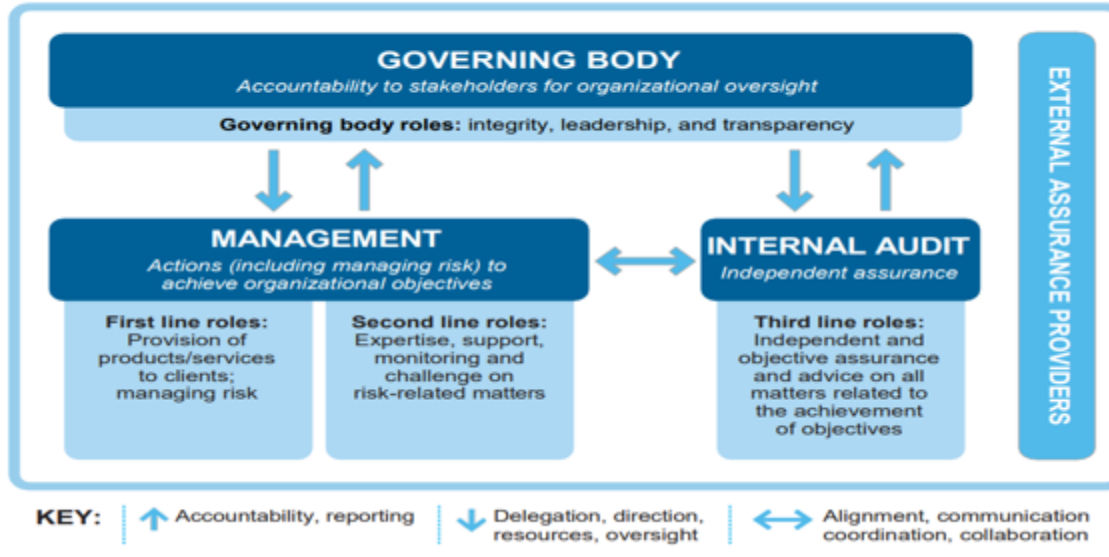
tidak berniat jahat
dengan
memanfaatkan
kondisi darurat



tidak membiarkan
terjadinya TPK



The IIA's Three Lines Model



Between Management (Both First And Second Line Roles) And Internal Audit

There must be regular interaction between internal audit and management to ensure the work of internal audit is relevant and aligned with the strategic and operational needs of the organization. Through all of its activities, internal audit builds its knowledge and understanding of the organization, which contributes to the assurance and advice it delivers as a trusted advisor and strategic partner.

There is a need for collaboration and communication across both the first and second line roles of management and internal audit to ensure there is no unnecessary duplication, overlap, or gaps.

Among all roles

The governing body, management, and internal audit have their distinct responsibilities, but all activities need to be aligned with the objectives of the organization. The basis for successful coherence is regular and effective coordination, **collaboration**, and communication.



Mengutamakan pencegahan kebocoran uang negara

Jika uang negara sudah terlanjut **bocor, manfaat** yang seharusnya sampai ke masyarakat sudah pasti **tidak dapat di-deliver** atau *delivery*-nya akan terhambat. Jadi, pencegahan harus menjadi prioritas



Sinergi dan kolaborasi APIP-BPK-APH harus dilakukan sejak awal, tidak saling tunggu

Untuk mengawal akuntabilitas dalam masa kedaruratan, skema *layering* peran APIP-BPK-APH tidak dapat dijalankan seperti dalam kondisi normal, **diperlukan adaptasi** yang relevan. **Kolaborasi** peran ketiganya diperlukan **sejak awal**, sehingga kapasitas untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah menjadi semakin kuat dan dapat dilakukan sedini mungkin



Kolaborasi dioptimalkan untuk menguatkan peran satu sama lain dalam melindungi uang negara

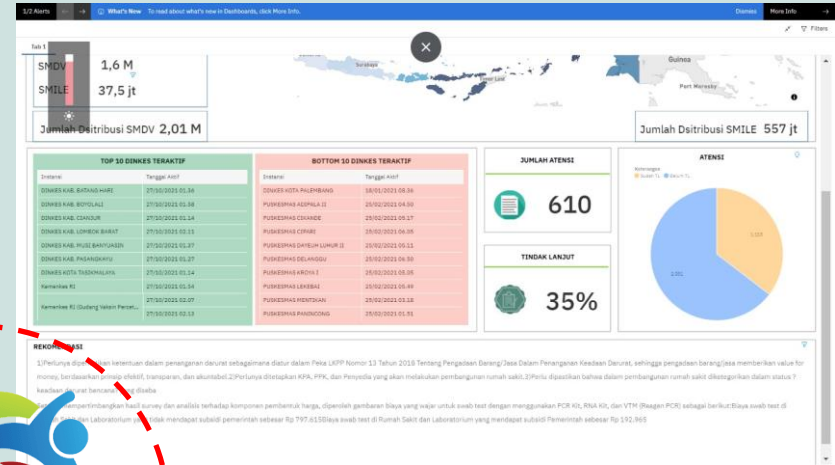
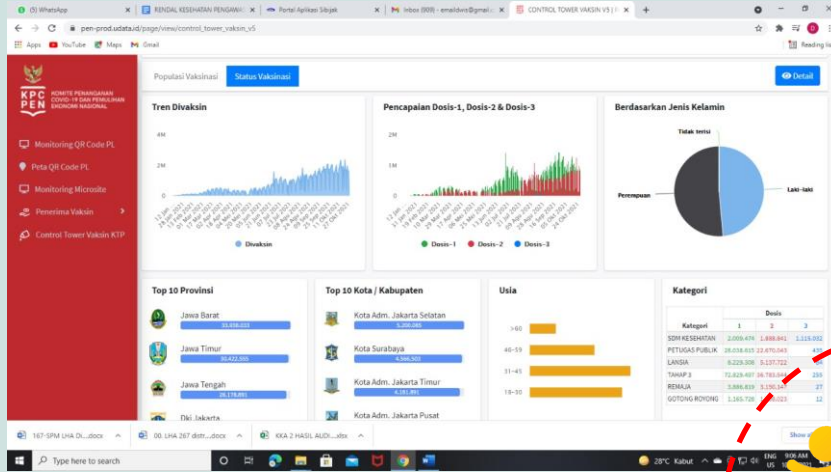
Peran APIP/BPK/APH **memiliki kelebihan dan keterbatasannya masing-masing**. Misalnya, APIP lebih dilibatkan dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan manajemen, BPK memiliki daya paksa yang lebih kuat atas temuan, sedangkan APH memiliki *sense* dan kewenangan yang sangat kuat untuk penindakan. **Kolaborasi** diarahkan untuk membangun **kombinasi optimal** dari peran ketiga institusi tersebut.



CACM Pengawasan PC PEN

CM

CA



SMILE

SMDV

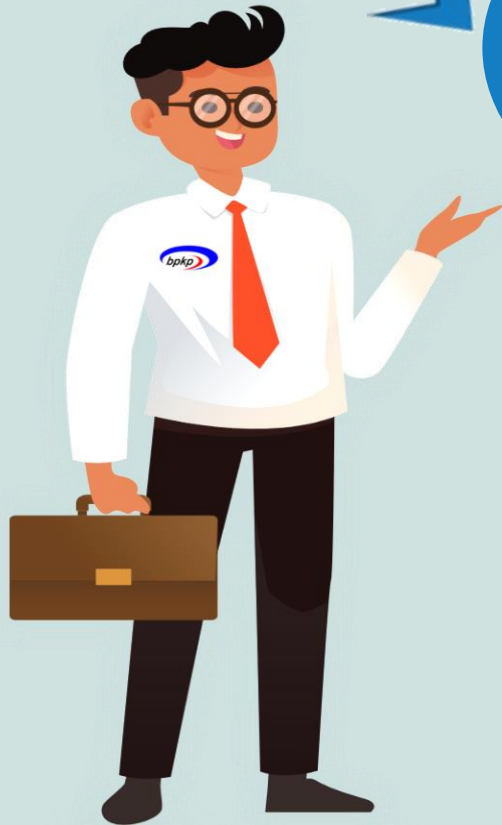


Kolaborasi

Aplikasi Pengawasan BPKP dan APiP



**BPKP SIAP
BERKOLABORASI DALAM
PENGUATAN
PENGAWASAN INTERN
ATAS PENANGANAN
COVID-19 DAN
PEMULIHAN EKONOMI
NASIONAL**



TERIMA KASIH

